

Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kredit Macet pada PT BPR NBP 20 Delitua

¹Marlina Br Perangin-angin, ²Mei Munthe, ³Jadongan Sijabat

^{1,2,3}Universitas HKBP Nommensen Medan, Jalan Sutomo, Medan, 20234, Sumatera Utara, Indonesia

^{1,2,3}University HKBP Nommensen, Road Sutomo, Medan, 20234, North Sumatera, Indonesian

ARTICLE INFO

Article history:

Kata Kunci:

Struktur Organisasi, Pedoman Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern, Laporan Terkait Pelaksanaan Fungsi Audit Intern

DOI:

ABSTRAK

Pengendalian internal adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan teknologi yang dirancang untuk membantu sebuah organisasi atau perusahaan untuk mencapai tujuannya. Pengendalian memiliki 3 kriteria yaitu Struktur organisasi, Pedoman Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern, dan Laporan Terkait Pelaksanaan Fungsi Audit Intern. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Kredit Macet pada PT BPR NBP 20 DELITUA. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Pengendalian Internal sebagai variabel independen dan Pencegahan Kredit Macet sebagai variabel dependen. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif dengan pengumpulan data yang digunakan adalah metode kuesioner dan dokumentasi. Metode pengumpulan data dengan cara kuesioner yaitu dengan mengajukan sejumlah pertanyaan yang tertulis dengan menggunakan skala likert untuk mengukur respon seseorang. Yang terdiri dari 30 karyawan bagian kredit dan 11 orang karyawan bagian Satuan Pengawasan Internal (SPI) pada PT BPR NB 20 DELITUA. Hasil pengujian menggunakan SPSS dalam penelitian ini menunjukkan bahwa peggendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan kredit macet. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan indikator pengendalian internal salah satunya laporan hasil kaji ulang dapat mempengaruhi pencegahan kredit macet agar laporan hasil kaji ulang tersebut tepat waktu perlu adanya pengambilan keputusan rapat komite sebelum di sampaikan kepada otoritas jasa keuangan (OJK).

ABSTRACT

Internal control is a process that is influenced by human resources and technology designed to help an organization or company to achieve its goals. Control has 3 criteria, namely organizational structure, Standard Guidelines for the Implementation of the Internal Audit Function, and Reports Related to the Implementation of the Internal Audit Function. The purpose of this study was to determine the effect of internal control on the prevention of bad loans at PT BPR NBP 20 DELITUA. The variables used in this study are Internal Control as the independent variable and Bad Credit Prevention as the dependent variable. This research is a quantitative descriptive- research with data collection used are questionnaires and documentation methods. The method of collecting data is by means of a questionnaire, namely by asking a number of written questions using a Likert scale to measure a person's response. Which consists of 30 employees of the credit department and 11 employees of the Internal Control Unit (SPI) at PT BPR NB 20 DELITUA. The

test results using SPSS in this study indicate that internal control has a positive and significant effect on the prevention of bad loans. This can be proven by indicators of internal control, one of which is the report on the results of the review that can affect the prevention of bad loans so that the report on the results of the review is timely, it is necessary to make a committee meeting decision before submitting it to the financial services authority (OJK).

1. PENDAHULUAN

BPR (Bank Perkreditan Rakyat) merupakan salah satu jenis bank yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dan menyalurkan kredit. Kredit merupakan sumber pendapatan utama bagi BPR guna kesinambungan usahanya, sehingga BPR harus senantiasa menjaga kualitas kreditnya.

Dengan adanya prosedur pemberian kredit diterapkan agar mengarahkan tercapainya tujuan usaha. Setiap prosedur pemberian kredit BPR harus menerapkan prinsip kehati-hatian agar kualitas kredit yang diberikan senantiasa lancar. Apabila BPR tidak mampu menjaga kualitas kreditnya dengan baik maka hal tersebut akan mempengaruhi kinerja BPR khususnya kinerja keuangan yang dapat mengakibatkan kemampuan BPR untuk memenuhi kewajibannya kepada nasabah penyimpan menjadi terganggu.

PT BPR NBP 20 Delitua menerapkan prosedur dan kebijakan dengan baik dalam pemberian kredit, namun di sisi lain terdapat masalah yang dialami yaitu kredit macet dimana kredit macet inilah yang sangat dikhawatirkan, karena akan mengganggu kondisi keuangan BPR, bahkan dapat mengakibatkan berhentinya kegiatan usaha. Namun dalam pemberian kredit pada PT BPR NBP 20 Delitua menimbulkan masalah yang dapat menyebabkan kesulitan debitur melaksanakan kewajibannya kepada bank ataupun bank kesulitan menagih kreditnya kepada debi-

tur, adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kredit macet adalah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor-faktor yang menyebabkan kredit macet yang berasal dari dalam perusahaan seperti sistem administrasi, pengawasan kredit dan informasi kredit. Artinya dalam melakukan analisis pihak bank kurang teliti sehingga apa yang seharusnya terjadi tidak diprediksi sebelumnya atau mungkin salah dalam melakukan perhitungan, dapat pula terjadi akibat kolusi dari pihak analisis kredit dengan pihak debitur sehingga dalam analisis dilakukan subjektif dan akal-akalan. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang menyebabkan kredit macet yang berasal dari luar perusahaan, seperti menurunnya pendapatan usaha debitur, timbulnya kerugian usaha debitur atau larinya debitur, ini menjadi salah satu debitur tidak mampu mengembalikan pinjaman kredit yang telah diperolehnya dengan tepat waktu dengan tidak dibayarnya utang atau kewajiban sehingga akan menyebabkan kredit menjadi macet.

Oleh karena itu untuk mencegah terjadinya kredit macet maka diperlukan adanya kontrol yang baik dari perusahaan. Menurut Salinan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 /SEOJK.03/2016 Tentang Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Perkreditan Rakyat terhadap Ketentuan pelaksanaan ini antara lain mencakup struktur organisasi, pedoman standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan laporan terkait pelaksanaan

* Marlina Br Perangin-angin, email address: marlina.peranginangin@student.uhn.ac.id

fungsi audit intern. Dalam hal ini pengendalian internal dibutuhkan untuk meminimalisasi terjadinya kemacetan kredit. Dengan adanya pengendalian internal diharapkan bank dapat menjamin proses pemberian kredit yang baik, yang diperlukan dalam upaya pencegahan kredit macet yang besar dikemudian hari yang dapat mengganggu stabilitas keuangan suatu bank.

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian maka yang akan menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah apakah pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan kredit macet pada PT BPR NBP 20 DELITUA?

Permasalahan yang ada cukup luas, sehingga perlu adanya pembatasan masalah yang akan diteliti. Hal ini agar tidak terjadi kesimpangsiuran dalam menginterpretasikan hasil penelitian. Ruang lingkup dalam penelitian ini yaitu pengaruh pengendalian internal terhadap pencegahan kredit macet, mengingat bahwasanya bagian internal (karyawan) dan bagian eksternal (debitur) dalam perusahaan tersebut dapat mengakibatkan kredit menjadi macet, tetapi pada kesempatan ini peneliti dibatasi hanya pada bagian internal (karyawan) khususnya dibagian kredit dan SPI (Sistem Pengawasan Internal). Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengendalian internal terhadap pencegahan kredit macet pada PT BPR NBP 20 DELITUA.

2. KERANGKA TEORITIS DAN HIPOTESIS

Pengertian Pengendalian Internal

Pengendalian internal ini cukup penting bagi perusahaan karena menyangkut data-data di dalam perusahaan. Sistem di dalam pengendalian internal ini meliputi seluruh cara dan alat yang ditetapkan untuk menjaga keamanan

harta dan data milik perusahaan, memeriksa ketepatan data, meningkatkan efisiensi operasional, dan menjaga peraturan yang sebelumnya sudah ditetapkan.

Mei H.M. Munte (2019:130) pengendalian internal adalah proses untuk mencapai tujuan tertentu atau merupakan rangkaian tindakan yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan, sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran yang diorganisasikan untuk menjaga harta kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi serta mendorong setiap pihak dalam organisasi untuk dapat mematuhi semua kebijakan yang telah ditetapkan.

Pengendalian internal suatu proses yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan teknologi informasi yang dirancang untuk membantu sebuah organisasi atau perusahaan untuk mencapai tujuannya masing-masing.

Pengendalian Internal Pemberian Kredit

Kredit merupakan pendapatan umum dari suatu bank. Jika pemberian kredit dilakukan secara tidak hati-hati maka akan terjadi kredit macet. Kredit macet bagi suatu bank merupakan masalah yang harus dihindari, karena akan menjadi kerugian bagi suatu bank. Salah satu cara untuk menghindari kredit macet adalah dengan adanya pengendalian intern pemberian kredit pada bank tersebut.

Pemberian intern pemberian kredit adalah usaha-usaha untuk menjaga kredit yang diberikan tetap lancar, produktif dan tidak macet. Lancar dan produktif maksudnya adalah kredit tersebut dapat ditarik kembali bersama dengan bunganya sesuai dengan jadwal dan perjanjian yang telah disetujui kedua belah pihak.

Bank harus memiliki struktur pengendalian intern yang memadai dalam

pemberian kredit kepada debitur, hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang yang nantinya akan mengakibatkan penurunan profitabilitas.

Tujuan Pengendalian Internal Kredit

Malayu S.P. Hasibuan (2008:105) tujuan pengendalian kredit, antara lain adalah untuk:

- a. Menjaga agar kredit yang disalurkan tetap aman.
- b. Mengetahui apakah kredit yang disalurkan itu lancar atau tidak.
- c. Melakukan tindakan pencegahan dan penyelesaian kredit macet atau kredit bermasalah.
- d. Mengevaluasi apakah prosedur penyaluran kredit yang dilakukan telah baik atau masih perlu disempurnakan.
- e. Memperbaiki kesalahan-kesalahan karyawan analisis kredit dan mengusahakan agar kesalahan itu tidak terulang kembali.
- f. Mengetahui posisi *presentase collectability credit* yang disalurkan bank.
- g. Meningkatkan moral dan tanggung jawab karyawan analisis kredit bank

Pengertian Pencegahan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007), "Pencegahan adalah proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu tidak terjadi. Dengan demikian, pencegahan merupakan tindakan. Pencegahan identik dengan perilaku.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian pencegahan kredit macet adalah proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu tidak terjadi dalam prosedur pemberian kredit dan sistem pengawasan internal agar kredit macet tidak terjadi di suatu bank.

Upaya Pencegahan Kredit Macet

Adapun yang menjadi penyebab utama timbulnya suatu kredit macet adalah kesulitan-kesulitan keuangan yang dialami oleh penerima kredit. Kesulitan-kesulitan ini timbul karena berbagai faktor. Faktor yang sangat besar pengaruhnya adalah apabila timbul tindakan-tindakan yang tidak efisien dari pimpinan suatu perusahaan, dalam hal mana pimpinan perusahaan mempunyai berbagai kelemahan dalam mengelola perusahaan, kelemahan dalam kontrol, ataupun kesalahan dalam penentuan kebijaksanaan perusahaan.

Strategi Pengawasan oleh Bank

Yuldiana Zesa Azisri (2017) "Pengawasan oleh bank terbagi menjadi dua yaitu pengawasan aktif dan pasif. Pengawasan aktif yaitu pengawasan yang dilakukan di tempat usaha debitur sehingga dapat diketahui setiap permasalahan yang terjadi. Pengawasan pasif yaitu pengawasan tertulis yang dilakukan debitur, seperti laporan keadaan keuangan, laporan penyaluran keuangan, laporan aktivitas, pembukuan, dll."

Fungsi *monitoring* dan pengawasan kredit merupakan alat kendali apakah dalam pemberian kredit telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan maupun ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan di bidang perkreditan, yaitu dalam bentuk surat edaran atau peraturan ataupun ketentuan-ketentuan lain yang berlaku secara umum maupun khusus. Pelaksanaan fungsi pengawasan ini merupakan tanggung jawab setiap level manajemen ataupun setiap individu yang mengelola kegiatan di bidang perkreditan pada masing-masing bank atau cabang. Sehingga pada hakikatnya, kegiatan pengawasan perkreditan bersifat melekat di dalam organisasi dan prosedur kerja yang ada yang dikelola masing-masing level manajemen/individu tersebut. Sementara itu,

fungsi pengawasan yang dilakukan oleh unit pengawasan eksternal, internal auditor lainnya merupakan sarana untuk melakukan re-checking dan dinamisator apakah internal control di bidang perkreditan telah berjalan sebagaimana mestinya.

Pengertian Kredit Macet

Nina Herlina (2018) pengertian kredit macet adalah Kredit macet sebagai pinjaman yang mengalami kesulitan dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya oleh nasabah debitur terhadap bank karena faktor kesengajaan dan atau faktor eksternal diluar kemampuan kendali debitur.

Nugrahini dan Jimmi (2015) kredit macet didefinisikan sebagai berikut: "suatu keadaan dimana seorang nasabah tidak mampu membayar lunas kredit bank tepat pada waktunya". Para nasabah telah memperoleh fasilitas kredit dari bank tidak seluruhnya dapat mengembalikan utangnya dengan lancar sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan. Pada kenyataannya didalam praktik selalu ada sebagian nasabah yang tidak dapat mengembalikan kredit kepada bank yang telah meminjamnya karena nasabah tidak dapat membayar lunas utangnya.

Unsur-unsur Kredit

Kredit yang diberikan oleh suatu lembaga kredit merupakan suatu kepercayaan. Berdasarkan hal tersebut, menurut Kasmir (2015:20) unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian kredit adalah sebagai berikut:

- a. Kepercayaan
Merupakan suatu keyakinan bagi si pemberi kredit yang diberikan (baik berupa uang, barang atau jasa) benar-benar diterima kembali dimasa yang akan datang sesuai jangka waktu kredit.
- b. Kesepakatan
Di samping unsure percaya di dalam

kredit juga mengandung unsure kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

- c. Jangka waktu
Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati.
- d. Risiko
Akibat adanya tenggang waktu maka pengembalian kredit akan memungkinkan suatu resiko tidak tertagihnya atau macet suatu pemberian kredit. Semakin panjang suatu jangka waktu maka semakin besar risikonya demikian pula sebaliknya.
- e. Balas jasa
Bagi bank balas jasa merupakan keuntungan atau pendapatan atas pemberian suatu kredit. Dalam bank jenis konvensional balas jasa kita kenal dengan nama bunga. Disamping balas jasa dalam bentuk bunga bank juga membebankan kepada nasabah biaya administrasi kredit yang juga merupakan keuntungan bank. Bagi bank yang berdasar prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.

Faktor penyebab kemacetan kredit

Pemberian kredit mengandung suatu resiko kemacetan. Akibatnya kredit tidak dapat ditagih sehingga menimbulkan kerugian yang harus ditanggung oleh bank. Tidak selamanya kredit yang diberikan bank kepada debitur akan berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diharapkan di dalam perjanjian kredit. Andi Ika Nurfika (2017:20) kemacetan kredit disebabkan oleh 2 faktor yaitu: Dari pihak nasabah dan Dari pihak perbankan. Dari definisi tersebut maka dapat dibuat pen-

jelasan sebagai berikut:

1. Dari pihak nasabah

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya kemacetan kredit yang berasal dari nasabah, antara lain:

- a. Adanya unsur kesengajaan. Dalam hal ini nasabah tidak bermaksud membayar kewajibannya kepada bank sehingga kredit yang diberikan macet. Dapat dikatakan tidak adanya unsur kemauan untuk membayar, walaupun sebenarnya nasabah mampu.
- b. Adanya unsur tidak sengaja. Artinya debitur mau membayar pinjamannya akan tetapi tidak mampu. Mungkin karena usaha yang dibiayai mengalami musibah seperti kebakaran, hama, banjir, dan sebagainya.

2. Dari pihak perbankan

Timbulnya kemacetan kredit selain berasal dari nasabah dapat juga berasal dari bank, karena bank tidak terlepas dari kelemahan dan keterbatasan yang dimilikinya. Artinya dalam melakukan analisis, pihak bank kurang teliti, sehingga apa yang seharusnya terjadi tidak diprediksi sebelumnya atau mungkin salah dalam melakukan perhitungan. Dapat pula terjadi akibat kolusi dari pihak analisis kredit dengan pihak debitur sehingga dalam analisis dilakukan subjektif dan akal-akalan.

Hipotesis

Menurut Sugiyono (2010:64) Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis

terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik. Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa hipotesis dari penelitian ini adalah Pengaruh pengendalian internal terhadap pencegahan kredit macet.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif karena fenomena permasalahan sudah ada. Metode ini digunakan untuk menjelaskan secara rinci tentang pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan kredit macet pada PT BPR NBP 20 Delitua.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai atau karyawan PT BPR NBP 20 Delitua. Maka yang akan menjadi kriteria sampel yang digunakan dari penelitian ini adalah karyawan atau pegawai bagian kredit sebanyak 25 orang dan bagian SPI (Satuan Pengawasan Internal) sebanyak 11 orang sehingga sampel yang dihimpun adalah 36 orang.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian. Sumber data adalah subjek darimana data diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui kuisisioner yang dibagikan kepada bagian kredit dan SPI (Satuan Pengawasan Internal) di PT BPR NBP 20 Delitua mengenai masalah yang diteliti.

Penelitian ini menggunakan teknik langsung pada perusahaan yang bersangkutan, sehingga diperoleh data dan informasi yang diperlukan. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi:

- a. Kuisisioner, yaitu mengajukan sejumlah pertanyaan yang tertulis kepada karyawan untuk mengetahui informasi khusus yang berkaitan dengan pengendalian internal dalam

pengecahan kredit macet. Peneliti akan menyebarkan kuesioner kepada bagian kredit, dan SPI (Sistem Pengawasan Internal) di PT BPR NBP 20 Delitua.

- b. Dokumentasi, yaitu mengumpulkan data berdasarkan dokumen-dokumen dan laporan tertulis lainnya yang terkait langsung dengan penelitian ini. Dokumentasi yang dimaksud adalah visi dan misi, struktur organisasi, kebijakan perkreditan BPR, prosedur kredit serta catatan kredit macet berdasarkan sektor ekonomi pada tahun 2017-2019 pada PT BPR NBP 20 Delitua.

Penelitian kepustakaan yaitu mengumpulkan bahan-bahan dengan cara membaca buku serta referensi lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Penelitian ini diperlukan sebagai bahan panduan untuk melakukan penelitian dilapangan, sebagai pedoman yang dapat dipertanggung jawabkan dalam pembahasan masalah sebagai dasar perbandingan praktek di lapangan.

Pengolahan data hasil penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis yang merupakan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.

4. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

1. Pengaruh Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Kredit Macet

Hasil uji hipotesis dapat dilihat dari tabel variabel pengendalian internal mempunyai tingkat signifikan sebesar 0,373. Hal ini berarti menerima H1 sehingga dapat dikatakan signifikan terhadap pencegahan kredit macet karena tingkat signifikansi yang dimiliki variabel pengendalian internal lebih kecil dari 0,05.

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kredit macet. Pengendalian internal memiliki beberapa kriteria yang menjadi bagian penting dalam mengurangi kredit macet yaitu sebagai berikut:

a. Struktur Organisasi

Dalam struktur organisasi yang diterapkan PT BPR NBP 20 Delitua menciptakan struktur organisasi secara keseluruhan sangat jelas dimana setiap karyawan pada perusahaan tersebut memiliki posisi dan fungsinya masing-masing, dan juga yang berkompeten sesuai dengan bidang dan keahliannya. Dari struktur organisasi BPR tersebut memuat secara jelas garis wewenang dan tanggung jawab setiap tingkatan jabatannya, terdapat juga uraian tugas secara tertulis, lengkap dengan jabatannya secara manual untuk setiap karyawan, dan pembagian tugas yang sudah dilakukan sesuai dengan struktur yang telah ada. Di dalam struktur organisasi BPR tersebut perusahaan kemudian menggambarkan pembagian kerja, dan aktivitas yang berbeda agar mampu saling bekerjasama dan adanya spesialisasi pada masing-masing fungsi pekerjaan. Dimana pada saat memberi kejelasan tanggung jawab masing-masing karyawan dalam struktur organisasi tersebut berjalan dengan lancar dan efektif sesuai dengan tanggungjawab tentang tugas-tugas dan segala kewajiban yang harus di pertanggungjawabkan pada atasan langsung yang telah memberikan wewenang terhadap karyawan. Kedudukan dan nama karyawan tercantum dalam struktur organisasi BPR dapat lebih mempermudah dalam mengatur kedudukan dan hubungan dengan fungsi pekerjaan yang telah dipercayakan, untuk menghindari adanya kesalahan informasi atau komunikasi yang berdampak negatif

serta dapat digunakan sebagai landasan dalam menyelesaikan pekerjaan yang memerlukan komunikasi dan diskusi antar jabatan dalam struktur organisasi. Jalur hubungan antara masing-masing karyawan dalam perusahaan ini sangat baik karena dapat menyelesaikan pekerjaan sehingga dapat saling memberikan keuntungan pada masing-masing anggota dalam struktur organisasi tersebut. Memberikan uraian tugas yang dibebankan secara jelas sehingga sangat membantu semua pihak yang terkait di dalam struktur organisasi baik itu atasan maupun bawahan, agar bagi atasan setiap pekerjaan bawahan akan membantu mereka dalam melakukan pengawasan dan pengendalian bila ada uraian pekerjaan yang tidak sesuai.

b. Pedoman Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern

Pedoman standar pelaksanaan fungsi audit intern, yang disusun sesuai sebagai acuan standar minimum oleh PT BPR NBP 20 Delitua. Dalam menyusun pedoman standar pelaksanaan fungsi audit intern ini juga memenuhi salah satu faktor penerapan tata kelola, menurut POJK No.4/POJK.03/2015 tata kelola adalah menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran. Penerapan tata kelola yang sudah diwujudkan pada PT BPR NBP 20 Delitua yaitu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi, seperti bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR yang sekarang sudah berjalan dengan baik. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris, seperti menjalankan tugas dalam pengawasan terhadap tugas dan tanggungjawab direksi dan juga memberikan nasehat yang baik jika ada kesalahan pada direksi. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite

yang dilakukan pada BPR yaitu melakukan pemantauan atas perencanaan dan pelaksanaan audit atas tindak lanjut audit. Penerapan fungsi kepatuhan BPR yaitu sudah memastikan kepatuhan terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan, audit intern BPR yaitu sudah menerapkan fungsi audit intern secara efektif dimana dalam melaksanakan tugas satuan kerja audit intern menyampaikan laporan kepada direktur utama dan dewan komisaris dengan fungsi kepatuhan, dan audit ekstern BPR yaitu sudah menunjukkan akuntan publik dan kantor akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit laporan keuangan tahunan BPR. Penerapan manajemen risiko BPR yaitu sudah menerapkan manajemen risiko secara efektif yang sudah disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, serta kemampuan BPR yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko, batasan maksimum pemberian kredit BPR sudah diterapkan sesuai dengan prinsip kehati-hatian dengan pedoman yang mengatur batas pemberian kredit, rencana bisnis BPR sudah diatur sesuai dengan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan, dan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan BPR sudah dilaksanakan sesuai dengan yang diatur dalam ketentuan yang mengatur mengenai transparansi kondisi keuangan BPR tersebut. BPR juga menyusun dan mengembangkan pedoman standar pelaksanaan fungsi audit intern sesuai kebutuhan operasional usahanya hanya saja tetap mengacu pada pedoman standar pelaksanaan fungsi audit intern.

c. Laporan Terkait Fungsi Audit Intern

Laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern terdapat juga pada PT BPR NBP 20 Delitua, sesuai pasal 73 ayat 1

POJK Tata Kelola BPR setiap laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern PT BPR NBP 20 Delitua disampaikan kepada otoritas jasa keuangan yang meliputi laporan pengangkatan atau pemberhentian kepala SKAI atau PE Audit Intern kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 hari kerja setelah tanggal pengangkatan atau pemberhentian kepala SKAI atau PE Audit Intern, laporan ditandatangani oleh direktur utama dan komisaris utama. laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern paling sedikit memenuhi standar yaitu tertulis, diuraikan secara singkat, dan mudah dipahami, objektif, konstruktif, dan sistematis. Laporan disusun oleh SKAI atau PE Audit Intern dan disampaikan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan, hasil audit yang bersifat rahasia kepada otoritas jasa keuangan. Laporan khusus dibuat terdapat temuan audit intern yang diperkirakan dapat mengganggu kelangsungan usaha BPR, yang memenuhi kondisi menurunkan rasio permodalan, terindikasi tindak pidana dan dapat menyebabkan BPR ditempatkan dalam pengawasan khusus. Laporan hasil kaji ulang terhadap pelaksanaan fungsi audit intern sudah disampaikan kepada pihak akuntan publik atau kantor akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, kaji ulang dilakukan paling sedikit sekali dalam 3 tahun paling lambat hasil laporan disampaikan 1 bulan setelah hasil kaji ulang oleh pihak akuntan publik namun dalam pelaporan hasil kaji ulang tersebut kadang belum tepat waktu dilakukan dan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan, kelalaian dalam pelaporan hasil kaji ulang ini dilakukan lewat dari batas waktu yang sudah ditentukan oleh otoritas jasa keuangan yaitu 1 bulan dari

waktu yang sudah ditentukan meskipun sudah diberikan batas waktu dari 1 bulan yang sudah ditentukan otoritas jasa keuangan tetapi perusahaan tersebut lebih dari 1 bulan belum melaporkan hasil kaji ulang tersebut kepada otoritas jasa keuangan, dampaknya menjadi perusahaan tersebut masuk ke dalam pengawasan khusus otoritas jasa keuangan tetapi belum kena sanksi karena batas waktu melaporkan hasil kaji ulang tersebut masih 1 bulan akhirnya perusahaan tersebut hanya dalam pengawasan khusus dalam 1 bulan tersebut sebelum perusahaan melaporkan hasil kaji ulang kepada otoritas jasa keuangan. Penyebab perusahaan terlambat melaporkan hasil kaji ulang tersebut yaitu di dalam pengambilan keputusan rapat komite yang dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris, rapat komite audit dilaksanakan apabila dihadiri oleh mayoritas anggota komite termasuk seorang komisaris independen dan pihak independen, pada saat melakukan rapat komite terkadang tidak berjalan dengan lancar karena direktur utama dan dewan komisaris jarang ada waktu dalam melaksanakan rapat komite tersebut akhirnya terjadi penundaan rapat komite, hal ini membuat laporan hasil kaji ulang terhadap pelaksanaan fungsi audit intern tidak sesuai dengan peraturan otoritas jasa keuangan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang sudah peneliti uraikan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal terhadap pencegahan kredit macet berpengaruh positif dan signifikan hal ini dibuktikan dengan kriteria dari pengendalian internal, yaitu: Adanya struktur organisasi pada PT BPR NBP 20 Delitua secara keseluruhan

yang sangat jelas, memuat secara jelas juga dengan jabatan dan tanggung jawab serta uraian tugas lengkap dengan nama karyawan untuk setiap jabatan. Dimana agar karyawan tersebut dapat bertanggungjawab dalam setiap jabatannya dan juga memiliki rasa kekeluargaan terhadap atasan dan jabatan setiap karyawan. Adanya pedoman standar pelaksanaan fungsi audit intern pada PT BPR NBP 20 Delitua yang memenuhi faktor penerapan tata kelola serta menyusun dan mengembangkan sesuai dengan kebutuhan usahanya. Adanya laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern pada PT BPR NBP 20 Delitua, yang menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian kepala SKAI atau Pe Audit Intern, laporan pelaksanaan dan pokok-pokok audit intern dan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan dan juga melakukan laporan hasil kaji ulang. Tetapi laporan hasil kaji ulang yang membuat BPR tidak sesuai dengan peraturan otoritas jasa keuangan karena terkadang melaporkan hasil kaji ulang tidak sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan oleh peraturan otoritas jasa keuangan.

Dalam melakukan penelitian mengenai pengaruh pengendalian internal terhadap kredit macet, peneliti dapat memberikan saran atau masukan kepada PT BPR NBP 20 Delitua dapat meningkatkan lagi kualitas pengendalian internal dengan kriteria laporan pelaksanaan fungsi audit intern yang tertera pada laporan hasil kaji ulang karena pengendalian internal pada kriteria laporan hasil kaji ulang tersebut pada saat rapat komite yang harus mengambil keputusan yang dilakukan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam pencegahan kredit macet yang terjadi di dalam 3 tahun terakhir sebelum hasil kaji ulang dilaporkan kepada otoritas jasa keuangan, agar berjalannya rapat komite

sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan agar pelaporan hasil kaji ulang tepat waktu saran peneliti perusahaan perlu mengadakan rapat dengan cara online atau dengan media teknologi sekarang agar memudahkan rapat komite berlangsung secara cepat dan akurat sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan oleh otoritas jasa keuangan, sehingga dengan peningkatan kualitas pengendalian internal pada kriteria laporan pelaksanaan fungsi audit intern dapat terus menekan tingkat kredit macet tiap tahunnya.

REFERENCES

- Depdiknas, (2007). Kamus Besar Bahasa Indonesia, Hasibuan, Malayu S.P, Hasibuan, (2008). Dasar-dasar Perbankan.: Bumi Aksara, Jakarta.
- Herlina, Nina., (2018). Antisipasi Bank Untuk Menghindari Kredit Macet Yang Ditimbulkan Oleh Kerugian Debitur Akibat Pencemaran Lingkungan, Vol. 6, No. 2, <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/galuhjustisi/article/view/1715> diunduh tanggal 24 Maret 2022
- Ika Andi Nurfika, (2017). Sistem Pengendalian Intern Dalam Upaya Mencegah Terjadinya Kredit Macet Pada PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero).Tbk Kantor cabang Sinjai, Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, https://www.onesearch.id/Record/IOS5739.article-302?widget=1&institution_id=562 diunduh tanggal 25 Maret 2022
- Kasmir, (2014). Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Edisi Revisi, Cetakan Keenambelas: Raja Grafindo Persada, Jakarta,.
- Kusumawati, Nugrahini., dan Jimmi,. (2015). Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Tingkat Kredit Macet Dalam Proses Pembiayaan Sepeda Motor PT Radana Finance Cabang Tanggerang Kota Banten, Jurnal Akuntansi, Vol 2 No. 1, <https://e-jurnal.lppmunsera.org/index.php/Akuntansi/article/view/193> diunduh tanggal 11 Februari 2022
- Munte, Mei H., (2019). Sistem Informasi Akuntansi.: Fakultas Ekonomi, Universitas HKBP Nommensen Medan, Medan,